



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667,
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ambonbpbl@gmail.com

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di J a k a r t a

17 Juli 2025

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.1410/BPBLA/TU.140/VII/2025

No	Jenis Dokumen Yang dikirim	Banyaknya
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan II Tahun 2025	1 (satu) rangkap

Penerima
Nama Jabatan :

Pengirim
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tanda tangan dan cap
Nama :
Diterima tanggal :
No.Telepon :

Sarwono

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 17 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono, S.St.Pi

Daftar ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif	1
I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sumberdaya Manusia	8
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	11
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	13
2.1. Visi Presiden	14
2.2. Misi Presiden	14
2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	15
2.4. Penetapan Kinerja	18
2.5. Pengukuran Kinerja	22
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	25
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	27
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	27
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	29
3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	45
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik	50
3.3. Akuntabilitas Keuangan	83
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran	86

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran	86
IV. Penutup	88
4.1. Simpulan	88
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi	88
4.3. Langkah Perbaikan	89
V. Lampiran	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025	6
Gambar 2.	Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan II tahun 2025	23
Gambar 3.	Calon induk Ikan Clownfish	31
Gambar 4.	Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan	36
Gambar 5.	Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon	40
Gambar 6.	Distribusi Bantuan Rumput Laut	49
Gambar 7.	Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	56
Gambar 8.	Tangkapan layar capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon TW II di aplikasi MonevPA kemenkeu	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025	8
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2025	8
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025	9
Grafik 4.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut	30
Grafik 5.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut	36
Grafik 6.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut.....	39
Grafik 7.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut	42
Grafik 8.	Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	15
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025	17
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan Kedua Tahun 2025	25
Tabel 4.	Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	27
Tabel 5.	Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	29
Tabel 6.	Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan II	30
Tabel 7.	Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	33
Tabel 8.	Capaian IKU Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	37
Tabel 9.	Capaian IKU Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	41
Tabel 10.	Capaian IKU Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	44
Tabel 11.	Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	46
Tabel 12.	Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	48
Tabel 13.	Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	51
Tabel 14.	Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	54
Tabel 15.	Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen).....	58
Tabel 16.	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	61
Tabel 17.	Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	63
Tabel 18.	Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	65
Tabel 19.	Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	68

Tabel 20.	Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	70
Tabel 21.	Deskripsi Tone Berita	71
Tabel 22.	Capaian IKU “Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen).....	72
Tabel 23.	Deskripsi Jenis Informasi Publik	74
Tabel 24.	Capaian IKU “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	77
Tabel 25.	Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	78
Tabel 26.	Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80
Tabel 27.	Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	82
Tabel 28.	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel 29.	Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan II tahun 2025	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan Kedua Tahun 2025 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2025, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-032.04.2.567720/2025 tanggal 02 Desember 2024. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Juni tahun 2025 sebesar Rp. 8,095,793,828 (Delapan Milyar Sembilan

Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 32,60% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan Juni tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
2. Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (ekor) tercapai 378 ekor di akhir triwulan kedua;
3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (ekor) tercapai 150.500 ekor di akhir triwulan kedua;
4. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (sampel) tercapai 435 sampel di akhir triwulan kedua;
5. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (sampel) tercapai 13 sampel di akhir triwulan kedua;
6. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (orang), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
7. Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
8. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (kg), tercapai 1.500 kg diakhir triwulan kedua;
9. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
10. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (indeks), tercapai 85,02 pada akhir semester pertama;
11. Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (persen), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (persen) tercapai 94,12% di akhir triwulan kedua;

13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (nilai), tercapai sebesar 94,23 pada akhir semester pertama;
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (persen) tercapai 100% pada akhir triwulan kedua;
18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.;
20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada triwulan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2025 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2025 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan visi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

1.1. Latar Belakang

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dghm RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I merupakan penguatan transformasi yang meliputi (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; (iii) Transformasi Tata Kelola; (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (vi) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana; dan (vii) Kestinambungan Pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun anggaran 2025 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;

6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, dan seluruh pegawai yang berjumlah 87 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertentu yang menjalankan kegiatan kereyasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

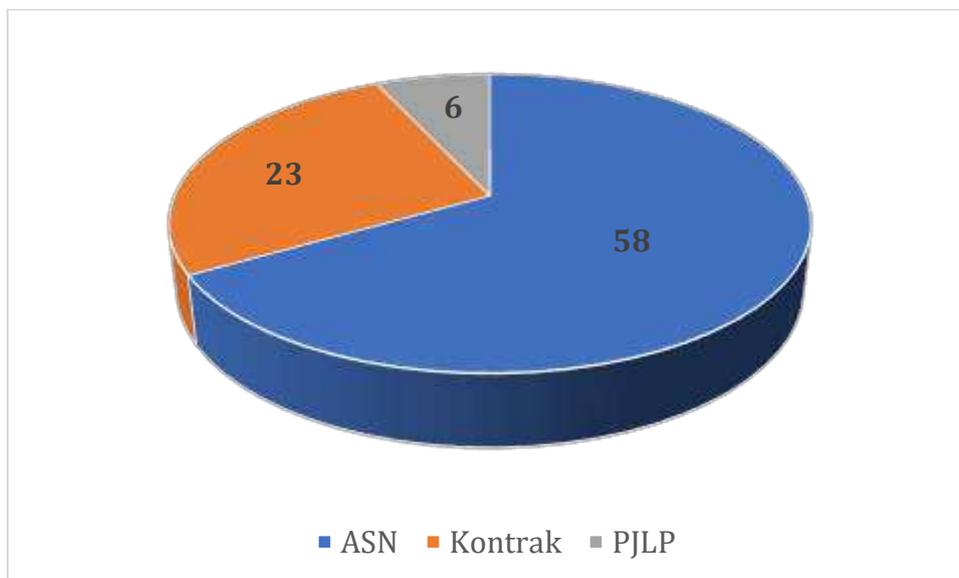
Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari : Analis Akuakultur, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelola Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

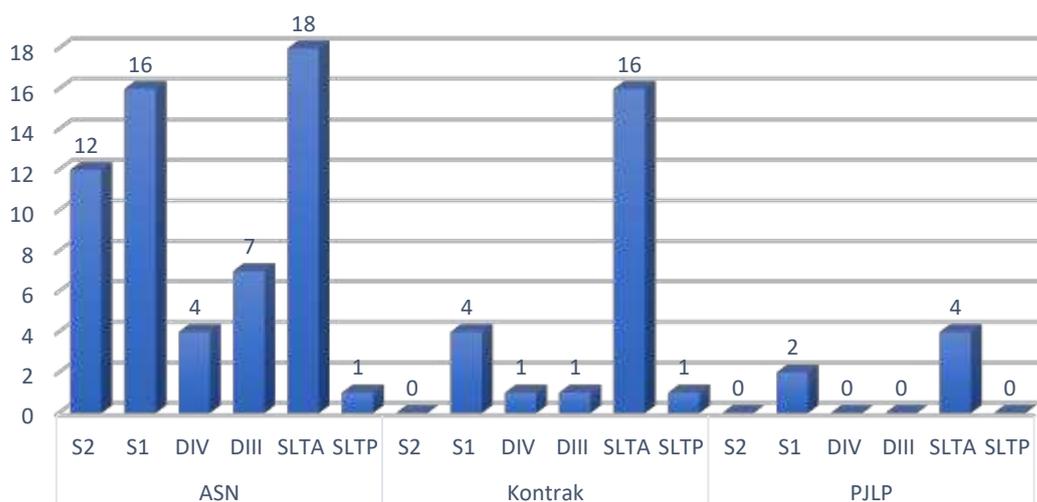
1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut dan Lobster
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium dan bibit Rumput Laut Kultur Jaringan

1.4. Sumberdaya Manusia

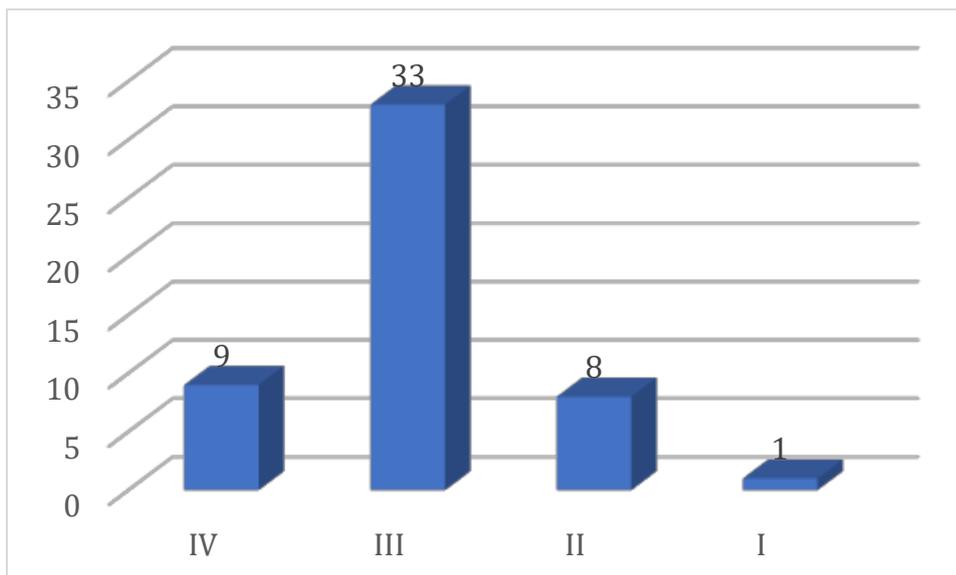
Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2025 terdiri dari 58 orang ASN (PNS dan PPPK), 23 orang tenaga kontrak dan 6 orang PJLP yang diuraikan sebagai berikut :



Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025



Grafik 2. Pendidikan Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025



Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. KKP akan mendukung pengembangan budidaya tuna oleh investor di perairan Biak, Papua. Pengembangan budidaya dapat meningkatkan produksi tuna Indonesia yang saat ini sudah menyumbang 18 % dari produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton. Dengan adanya tuna farming yang akan dilakukan oleh pelaku usaha maka akan mengurangi tekanan penangkapan tuna yang pada akhirnya akan menjaga kelestarian sumber daya tuna di masa mendatang.

Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukkan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi
5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan

Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.1. Visi Presiden

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Visi KKP adalah "Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Asta Cita, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)
<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel) • Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)
<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) • Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen) • Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai) • Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)
--	--

2.3.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025: Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	3.363.744.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	14.432.846.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2025		24.830.270.000

2.4. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025, adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142
		3.	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586
		4.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309
		5.	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17
		6.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400
		3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7.
8.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)			10.124
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	9.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3
	17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86
	18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70
	20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80
	21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

DATA ANGGARAN :

No.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Laut	3.363.774.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	14.432.846.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025		24.830.270.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

2.5. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

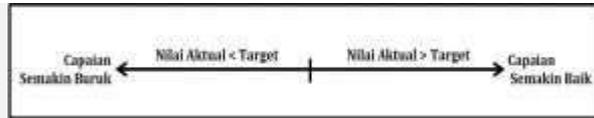
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata indikator kinerja utama dan IKM pada tahun 2025 di triwulan kedua adalah sebesar 114,06 yang termasuk kategori Baik. Berikut adalah hasil tangkap layar capaian kinerja BPBL Ambon tahun Triwulan II tahun 2025.



Gambar 2. Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan II tahun 2025

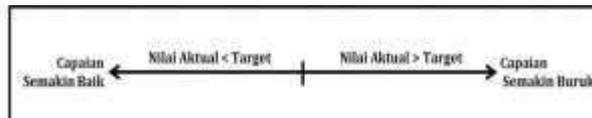
Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. **Maximize:** Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



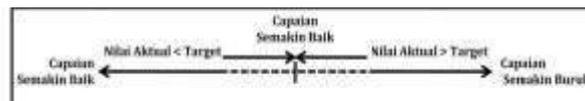
Contoh polarisasi data *maximize*.

2. **Minimize:** Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



Contoh polarisasi data *minimize*.

3. **Stabilize:** Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.



Contoh polarisasi data *stabilize*.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	280 ekor	378 ekor	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW II
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	117.000 ekor	150.500 ekor	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW II
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	103 sampel	435 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW II
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	8 sampel	13 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW II
		Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	1.379 kg	1.500 kg	Capaian IKU ini mencapai 108,77% pada TW II

4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81	74	85,02	Capaian IKU ini mencapai 114,89% pada semester I
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%	85%	94,12%	Capaian IKU ini 110,73% pada TW II
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92	85	94,23	Capaian IKU ini mencapai 110,86% pada semester I
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%	86%	100%	Capaian IKU ini mencapai 116,28% pada TW II
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

IKU 1 : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya ikan air tawar memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 266 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele Atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2025, pada tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 11 unit yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Tabel 4. Capaian IKU “Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar						
Nama Indikator : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)			Target (unit)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	11	0

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU ini di triwulan kedua yang masih kosong akibat dari penghematan anggaran kegiatan sehingga target IKU ini di TW II dikosongkan dan terakumulasi ke TW IV Tahun 2025. Pada TW II ini telah dilakukan verifikasi

beberapa kelompok penerima (CPCL) via online terhadap rekomendasi Anggota DPR RI yang telah masuk. CPCL dilakukan untuk melihat secara detil kesiapan atau kelengkapan dokumen kelompok penerima.

Perbandingan Kinerja

Capaian IKU ini di TW II bila dibandingkan dengan TW II Tahun 2024 memiliki capaian yang sama dimana realisasi TW II Tahun 2024 telah mencapai 0%. Capaian kinerja IKU ini dilakukan di akhir tahun. Adanya efisiensi anggaran dan penurunan target IKU ini merupakan salah satu rendahnya IKU ini di TW II Tahun 2025. Kondisi ini hampir sama dengan UPT laut lainnya.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Rendahnya nilai capaian dikarenakan belum semua rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon Lokasi dari anggota dewan DPR RI yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon dan adanya efisiensi anggaran.

Analisa Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 6,870,000 dari pagu anggaran senilai Rp. 958,000,000 atau sebesar 0,72 %.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan pemerintah dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perhitungan capaian kegiatan dilaksanakan di akhir tahun dengan melihat jumlah sarana yang telah disalurkan ke masyarakat dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN II : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 2 : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Produksi calon induk ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu bagi kegiatan budidaya ikan di BPBL Ambon.

Tabel 5. Capaian IKU “Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)			Target (ekor)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
280	378	120	120	100	1.142	33,10

Capaian Kegiatan IKU

Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 1.142 ekor. Sampai akhir triwulan kedua 2025 capaian produksi calon induk teralisasi 378 ekor atau sebesar 120% dari target Triwulan II dan 33,10% dari target tahunan. Produksi calon Komoditas induk yang diproduksi oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

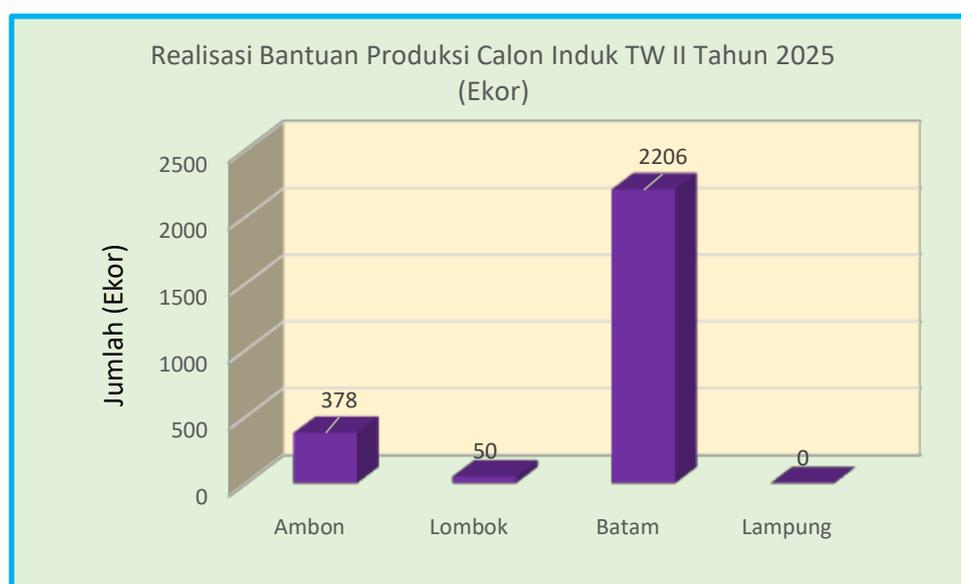
Analisa Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Juni 2025 terealisasi sebesar Rp. 305,968,000 dari pagu anggaran senilai Rp. 305,968,000 atau sebesar 100 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun pada triwulan kedua 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan II

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	308 ekor
2.	Clownfish	70 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	-
4.	Kerapu	-



Grafik 4. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Perbandingan Kinerja

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2025 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan kedua tahun 2025 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Batam dengan jumlah 2206 Ekor. Sementara itu BPBL Ambon mampu memproduksi sebanyak 378 Ekor calon induk dan BPBL Lombok 50 ekor serta BBPBL Lampung belum ada produksi.

Capaian IKU ini di TW II juga dibandingkan dengan IKU yang sama di TW II Tahun 2024 dan hasilnya meningkat hamper 449%. Keberhasilan ini diduga

disebabkan oleh makin baiknya manajemen pembesaran ikan yang dilakukan di keramba jaring apung baik terhadap ikan konsumsi maupun ikan hias laut.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Data capaian IKU ini di TW II menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calon yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan. Disamping itu terhadap ikan hias laut yang telah mencapai 50 varian mempunyai variasi atau peluang ketersediaan induk yang cukup variasi.



Gambar 3. Calon induk Ikan Clownfish

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain tetap melalui peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Telah dilakukan grading secara teratur guna menekan tingkat kanibalisme ikan selama proses pemeliharaan. Mengatur pola pakan yang tepat (mencukupi) dengan melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan buatan (pabrikan) dan pakan segar (ikan rucah) yang relative lebih murah.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menghadapi perubahan musim/cuaca pada beberapa bulan ke depan, perlu adanya upaya antisipasi agar tidak terjadi kematian massal pada calon induk yang dipelihara dan menjalankan SOP pemeliharaan calon induk dengan baik dan benar.

IKU 3 : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Bantuan benih ikan laut adalah program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyediakan benih ikan berkualitas kepada pembudidaya ikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, kesejahteraan pembudidaya, dan ketahanan pangan.

Capaian Kegiatan IKU

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2025 sebesar 423.586 ekor. Dimana Perhitungan pencapaian target IKU bantuan benih dilakukan per triwulan dalam aplikasi kinerjaku, benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat berupa jenis ikan konsumsi dan ikan hias laut. Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan Juni 2025 ini adalah sebesar 150.500 ekor dari perencanaan target triwulan yang telah ditetapkan sebesar 117.000 ekor. Bantuan Benih yang disalurkan pada triwulan kedua terdiri atas benih ikan konsumsi yang didominasi benih ikan kakap putih sebanyak 147.500 ekor dan benih ikan hias sebanyak 3.000 ekor. Realisasi TW II berdasarkan target TW II adalah 120%, namun jika dibandingkan dengan target tahunan maka telah bantuan benih ikan laut tahun 2025 telah tercapai 35,53%.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 1.329.391.000,-. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 924,686,704 atau sebesar 69,56% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 7. Capaian IKU “Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)			Target (ekor)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
117.000	150.500	120	120	100	423.586	35,53

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi Bantuan Benih pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih dan ikan hias laut. Bantuan benih diberikan kepada pembudidaya yang ada di Propinsi Maluku yaitu di Kota Ambon. Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Perbandingan capaian TW II Tahun 2025 dan TW II Tahun 2024 terjadi kesamaan dicapaian dimana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubara (Kuwe) serat ikan hias clownfish yang mencapai 50 varian. Perbedaan tata Kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan yang kurang lengkap atau jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan yang terlalu jauh/akses transportasi sulit atau biaya operasional pengangkutan yang terlalu tinggi.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. *Trichodina* sp.

merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang *Trichodina* sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang *Trichodina* sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al. 2014). *Trichodina* sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003). Predileksi *Trichodina* sp. adalah permukaan tubuh, sirip dan insang (Afifah et al. 2014). Karakter morfologi, identifikasi *Trichodina* sp. meliputi ukuran diameter tubuh, diameter cincin dentikel, diameter adhesive disc, lebar membran dan karakter meristik yaitu jumlah dentikel (Dana et al. 2002; Anisah et al. 2016).

Zheila (2013), permukaan tubuh berhubungan langsung dengan lingkungan yang memudahkan serangan *Trichodina* sp., selain itu permukaan tubuh juga menjadi tempat hidup yang baik bagi ektoparasit (Zheila 2013). Menurut Pramono dan Syakuri (2008), *Trichodina* sp. menempel pada permukaan tubuh dan akan berputar 360° dengan menggunakan silia sehingga akan merusak sel-sel disekitar dan memakan sel. Riwidharso et al. – *Trichodina* pada benih ikan nilam di Balai Benih Ikan Kutasari Purbalingga 323 epitel yang hancur hingga mengakibatkan iritasi pada permukaan tubuh. Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan *Trichodina* sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hyperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hyperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas (Afifah et al. 2014).



Grafik 5. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Perbandingan Kinerja

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan kedua tahun 2025, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal bintang, Lombok dengan kakap putih nya. Pencapaian tertinggi ada di BBPBL Lampung yang diikuti oleh Ambon Batam, dan Lombok.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui mengaktifkan kembali beberapa hatchery yang ada dan penerapan atau menjalankan SOP kegiatan dengan baik dan penerapan *biosecurity* di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan induk dan benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada

peningkatan survival rate induk dan benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rendahnya produksi benih juga disebabkan oleh serangan penyakit, maka rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi *Trichodina* dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan fumisid 5-10 ppm selama 30 menit dan diulang jika masih terjadi infeksi. Selain itu dilakukan penambahan vitamin C dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.



Gambar 4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan

IKU 4 : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupannya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Capaian Kegiatan IKU

Hingga akhir triwulan kedua tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 435 sampel dari target triwulan kedua sebesar 103 sampel. 435 sampel tersebut terdiri dari 136 sampel untuk pengujian kualitas air, 287 sampel untuk pengujian mikrobiologi dan 12 sampel untuk pengujian biomolekuler.

Tabel 8. Capaian IKU “Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)			Target (sampel)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
103	435	120	120	100	309	140,78

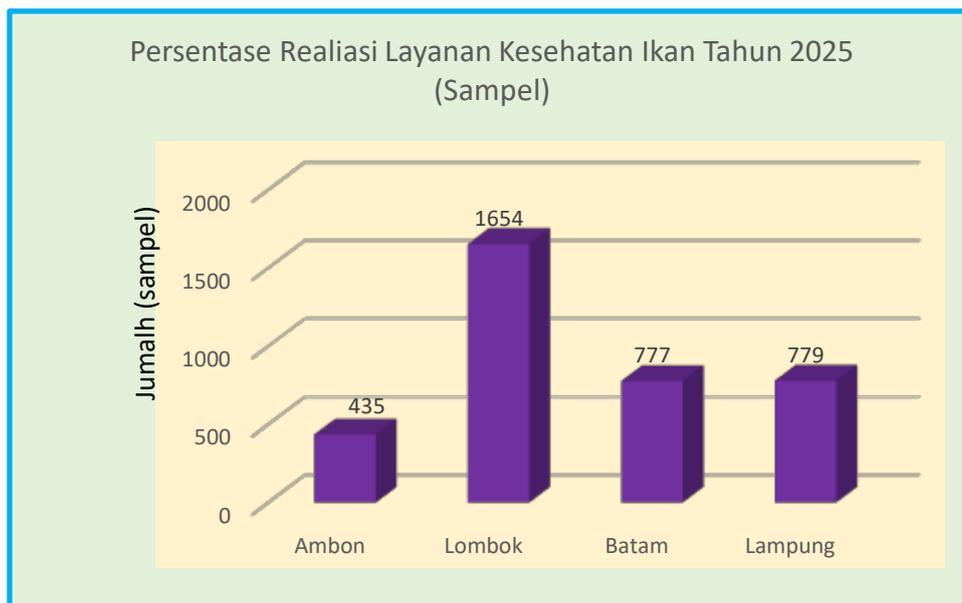
Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari jumlah sampel yang diuji, sampel ikan hias merupakan sampel dengan infestasi mikro-parasit tertinggi dibandingkan sampel benih ikan konsumsi. Infestasi parasite pada ikan hias nemo didominasi oleh *Pseudorhabdosynocus* sp. sedangkan pada ikan konsumsi didominasi oleh *Trichodina* sp. Selain cacing *Pseudorhabdosynocus* sp., infestasi parasite pada ikan nemo juga ditemukan cacing *Haliotrema* sp, dan siliata *Amyloodinium*, *Uronema* dan *Cryptocaryon*. Organ yang terserang adalah insang, sehingga hasil pengamatan menunjukkan adanya abnormal pada struktur insang berupa hyperplasia, edema, nekrosis, maupun kongesti. Kondisi abnormal pada struktur insang menyebabkan kesulitan dalam penyerapan oksigen dengan optimal.

Hasil pengujian mikro-bakteri pada sampel menunjukkan adanya infeksi vibriosis. Spesies *Vibrio* yang patogen mampu menimbulkan penyakit epizootic yang serius, namun beberapa spesies yang lain hanya bersifat patogen oportunistik yang menyebabkan penyakit apabila ikan mengalami luka fisik, luka akibat parasit, dan stress. Menyukai lokasi pesisir untuk berkembang karena pengaruh bahan organik yang melimpah di area pesisir. Semakin tinggi nilai TOM maka semakin tinggi kelimpahan bakteri *Vibrio* di perairan. Selain itu suhu perairan yang hangat juga memicu kelimpahan bakteri di perairan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kualitas air, dimana nilai TOM cukup tinggi yang berdampak pada kelimpahan bakteri $>10^5$ kol/ml.

Hasil uji virus pada sampel benih ikan konsumsi tidak ditemukan hasil positif. Hal ini diduga karena sampel ikan yang mengalami kematian memang tidak terinfeksi oleh *Iridovirus* maupun VNN.

Perbandingan Capaian IKU ini di TW II Tahun 2025 dan dibandingkan dengan TW II Tahun 2024 terjadi peningkatan layanan sampel. Salah satu factor yang diduga memicu penyebabnya adalah musim hujan yang sudah di intens di Bulan April-Juni 2025 yang menyebabkan penurunan kualitas air dan memudahkan serangan penyakit.



Grafik 6. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Perbandingan Kinerja

Walaupun layanan pengujian sampel BPBL Ambon TW II Tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TW II Tahun 2024, namun bila dibandingkan dengan jumlah layanan pengujian sampel pada UPT Laut lainnya merupakan yang terendah. Penyebab perbandingan adalah jumlah pembudidaya, komoditas dan lahan budidaya yang beroperasi di Ambon masih yang terendah.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Pengujian Sampel adalah Rp. 69,414,000,-. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 49,153,000 atau sebesar 70,81% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami

maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.

Sampel uji berupa sampel ikan dan sampel air baik internal maupun eksternal. Kondisi sampel ikan harus masih segar, baru mati, atau masih hidup dan belum busuk. Sampel uji internal diperoleh dari sampel ikan dari unit-unit produksi internal melalui pengambilan sampel aktif secara purposive (ditentukan) yaitu ikan yang diduga terkena infeksi pathogen. Sementara sampel eksternal diperoleh dari pihak luar yang memasukkan sampelnya untuk diuji.



Gambar 5. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulangan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 5 : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)

Isu Resistensi Antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) telah menjadi perhatian semua pihak baik di lingkup kesehatan manusia, lingkungan, perikanan maupun peternakan. Untuk merespon ancaman AMR tersebut,

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya mengimplemantasikan rencana aksi nasional yang telah disusun bersama kementerian kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa produk akuakultur khususnya komoditas ikan konsumsi telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat.

Kegiatan surveilans dan pengujian Antibiotic Microbial Resistance (AMR) bertujuan untuk memantau jenis, jumlah, distribusi, tepat atau tidaknya antimikroba yang dipergunakan untuk penanganan penyakit ikan dalam perikanan budidaya. Selain itu memantau kejadian resistensi bakteri patogen pada ikan terhadap antimikroba tertentu. Data hasil surveilan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terhadap penggunaan antibakteri pada bidang perikanan.

Capaian Kegiatan IKU

Lokasi surveilans AMR yang dilakukan BPBL Ambon berlokasi pada KJA kelompok pembudidaya di perairan Desa Waiheru, Teluk Ambon Dalam Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan sampel ikan dari jenis kerapu, kakap dan kuwe/bubara yang dipelihara oleh pembudidaya. Adapun capaian IKU TW ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 9. Capaian IKU “Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)”

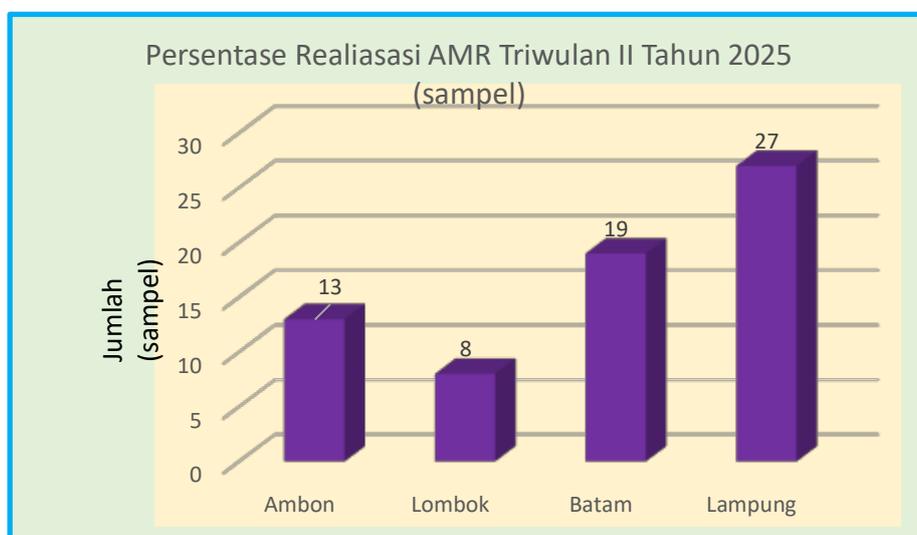
Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)			Target (sampel)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
8	13	120	120	100	17	76,47

Hasil surveilans tahun 2025 dilaksanakan di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon di area perairan Teluk Ambon Dalam (TAD) dan Teluk Ambon Luar (TAL). Penyempitan lokasi target berkaitan dengan penyesuaian anggaran pengambilan sampel AMR. Pengambilan sampel AMR akan dibagi per triwulan untuk TAD dan TAL. Penurunan target sampel di tahun 2025 menjadi 17 sampel dibanding tahun-tahun sebelumnya berdampak pada penurunan perolehan isolate positif *V. alginolyticus*.

Perbandingan Kinerja

Seperti halnya di tahun 2024, tidak ditemukan isolate positif *V. alginolyticus* pada sampel AMR yang lokasi di perairan Desa Waiheru, Teluk Ambon Dalam. Bakteri yang teridentifikasi dominan dari jenis *V. fluvialis*. Jenis bakteri ini dapat bertahan pada perairan dengan salinitas yang cukup rendah. Jika dikaitkan dengan lokasi KJA pembudidaya yang berada di sekitar muara sungai, selaras dengan dominasi jenis *V. fluvialis* pada sampel ikan yang diperoleh Di Triwulan II, dari sampel ikan yang di peroleh tidak ditemukan positif bakteri *V. alginolyticus* sehingga tidak diperoleh data sensitivitas antimikroba. Sehingga belum dapat disimpulkan tidak adanya penggunaan kedua bahan antimikroba tersebut pada proses budi daya ikan di KJA di perairan desa Waiheru, meski data *Antimicrobial Use* (AMU) menyatakan tidak adanya penggunaan bahan antimikroba.

Hingga akhir triwulan kedua tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR telah melebihi target triwulan yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel AMR yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon sudah mencapai 13 sampel yang melebihi dari target Triwulan II sebesar 4 sampel uji. Namun demikian bila dibandingkan dengan capaian TW II Tahun 2024 mengalami penurunan. Dan persentase capaian UPT laut juga masih rendah bila dibandingkan dengan BPBL Batam dan BBPBL Lampung. Hanya sedikit lebih tinggi dari BPBL Lombok.



Grafik 7. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU ini adalah Rp. 15,538,000. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Mengidentifikasi lokasi-lokasi budidaya yang rentan terjadi serangan penyakit. Selanjutnya menjalankan kegiatan pengujian layanan kesehatan ikan dan lingkungan terkhusus sampel untuk sampel-sampel yang diduga mengalami AMR. Setelah itu dilakukan pemetaan sebaran penyakit-penyakit tersebut.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulangan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 6 : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU ini sampai TW II Tahun 2025 masih kosong yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran kegiatan sehingga penjadwalan target yang ditetapkan pada TW IV, sehingga kegiatan sampai sekarang masih berkoordinasi dengan para tenaga ahli Anggota DPR RI.

Tabel 10. Capaian IKU “Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)			Target (orang)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	110	0	400	0

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Koordinasi intensif dengan para tenaga ahli anggota DPR RI terkait pelaksanaan bimtek pembenihan ataupun budidaya ikan laut.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU AMR Rp. 160,000,000. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 belum ada realisasi atau 0 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Dalam suatu keadaan, suatu perubahan yang kecil dan sederhana dalam budidaya perikanan mungkin merupakan tindakan paling strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan serta dalam meletakkan landasan bagi pembangunan. Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

SASARAN KEGIATAN III : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT

IKU 7 : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 38 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon di triwulan kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Capaian IKU “Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)			Target (unit)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	120	0	72	0

Capaian IKU ini sampai TW II Tahun 2025 masih kosong dan masih berkoordinasi dengan Dinas Kalutan dan Perikanan di daerah dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI.

Perbandingan Kinerja

Bila dibandingkan dengan capaian IKU TW II Tahun 2024 mengalami penurunan dimana pada TW II Tahun 2024 sudah terealisasi 13,16% distribusi dan beberapa sudah dilakukan CPCL.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Efisiensi anggaran terhadap bantuan pemerintah menyebabkan penjadwalan ulang target realisasi ke Triwulan IV tahun berjalan dan capaian akan dihitung secara tahunan.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon adalah Rp. 1,081,300,000 Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 3,207,600 atau sebesar 0,30% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

IKU 8 : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginoFit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus* sp, *Euchema* sp, *Chondrus* sp, *Hypnea* sp dan *Gigartina* sp. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Capaian Kegiatan IKU

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman, (Masak et al.2011). Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya rumput laut. Produktifitas penyediaan bibit

unggul dengan metode stek ini belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton per tahun.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik dalam wadah tertutup sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- Memiliki sifat identic dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas
- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.

Tabel 12. Capaian IKU “Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)			Target (kg)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
1.379	1.500	108,77	107,98	100,73	10.124	14,82

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Bantuan bibit rumput laut adalah Rp.222,520,000,-. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 141,931,000 atau sebesar 63,78% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Teknik embryogenesis somatic pada rumput laut adalah Teknik mengubah sel somatic dari talus menjadi sel embrio bipolar atau dalam rumput laut disebut sel carospore. Teknik ini dilakukan dengan menginduksi tumbuhnya kalus dari potongan talus, kalus adalah sekelompok sel yang tumbuh tidak berdiferensiasi, sel

sel kalus yang terbentuk diregenerasikan menjadi kalus embriogenik yang selanjutnya sel embrio somatic ini diregenerasikan menjadi mikropropagul kemudian menjadi planlet siap diaklimatisasi.



Gambar 6 . Distribusi Bantuan Bibit Rumput Laut

Perbandingan Kinerja



Grafik 8. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi planlet rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Lombok dan Batam pada tahun 2025 belum terealisasi. Data tersebut menunjukkan setiap satker dalam tahapan produksi planlet rumput laut berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi bibit rumput laut antara lain melalui peningkatan jumlah sarana kultur yang mengalami kerusakan, diharapkan di awal musim tanam kegiatan perbanyak rumput laut dapat berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan sehingga produksi bibit rumput laut kultur jaringan. Dilakukan perbaikan metode pemeliharaan bibit terutama bibit yang baru dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan dengan metode modifikasi floating bottle untuk mengurangi potensi kerusakan/kematian bibit.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak terkait sehingga bantuan bibit rumput laut dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN KEGIATAN IV : TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK

IKU 9 : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP

adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IKU “Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	84	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Upaya Peningkatan nilai PM SAKIP lingkup BPBL Ambon pada tahun 2025 dilakukan dengan mengisi dan mengupload dokumen SAKIP di Kinerjaku dan Google Drive SAKIP DJPB Dokumen SAKIP yang telah diinput mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulanan beserta bukti dukungnya
2. Rencana Aksi Triwulanan
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
4. Rincian Target IKU tahun 2025
5. Perjanjian Kinerja tahun 2025
6. Renja
7. Manual IKU
8. SKP pegawai

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam

evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 13 dapat diketahui bahwa capaian nilai PM SAKIP SaBPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan asistensi dan atau audit PM SAKIP oleh eselon I dan ti audit.

IKU 10 : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budi Daya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip *the right man and the right place* dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMENSJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai Human Capital Development Plan (HCDP).

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Indeks Profesional ASN Unit Kerja BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)			Target (indeks)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
74	85,02	114,89	99,96	114,93	81	104,96

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana mencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

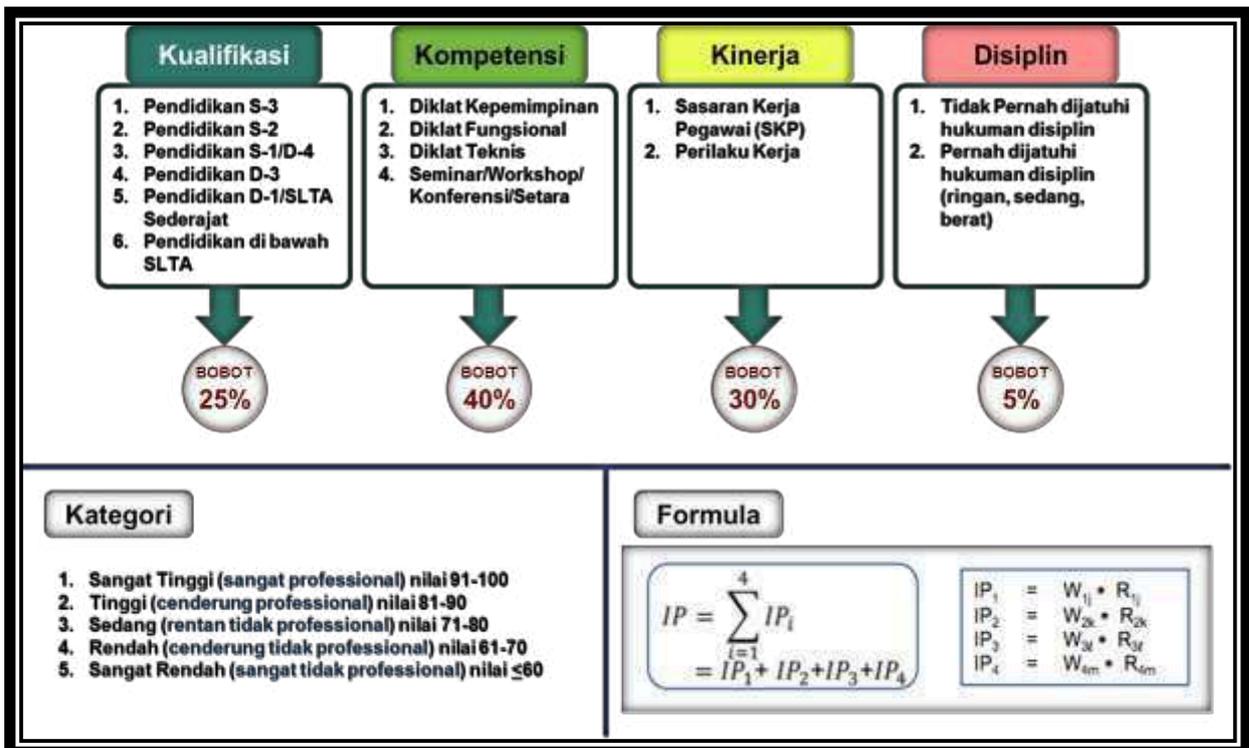
Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang

- pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
 4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang diduduki dan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.



Gambar 7. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 14 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, hal ini diduga adanya perbaikan manajemen ASN sehingga dapat meningkatkan indeks tersebut. Capaian IKU ini juga melebihi nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada periode yang sama yaitu pada angka 82,02.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai

disesuaikan dengan tugas dan jabatannya sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 11 : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu

menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IKU “Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	100	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keuangan dan aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi melakukan kegiatan terkait keuangan sesuai peraturan yang berlaku, inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama dan satker lainnya disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 12 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit

- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
85	94,12	110,73	120	92,28	85	110,73

Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada triwulan kedua sebesar 94,12% rekomendasi itjen telah terselesaikan rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh satker. Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan itjen yang tebit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 yang telah ditindaklanjuti tuntas sampai dengan 30 Juni 2025.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon pada triwulan ini meliputi penyelesaian tindak lanjut atas temuan/sisa rekomendasi LHP Itjen KKP pada tahun 2024 yang telah diselesaikan tepat waktu dan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK).

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 15 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama namun nilai

capaian BPBL Ambon relatif sama dengan capaian satker lain, hal ini dikarenakan nilai capai satker yang tidak ada audit dari itjen di triwulan II maka nilainya disamakan dengan capaian rata-rata unit kerja di DJPB pada triwulan ini .

Rencana Tindak lanjut

Pada Triwulan II, pada BPBL Ambon telah dilaksanakan Pemantauan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024-2025 pada BPBL Ambon. Dari kegiatan tersebut ada 3 temuan dengan jumlah 7 rekomendasi dan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 409,312. Rencana yang akan diambil adalah dengan sesegera mungkin menindaklanjuti temuan tersebut sesuai batas waktu yang diberikan agar tuntas di triwulan ke depan.

IKU 13 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 17. Capaian IKU “Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	76	0

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Pada tahun 2025 akan direncanakan dilakukan assessment penilaian ulang dari kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja
- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 16 dapat diketahui bahwa IKU ini sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dapat diketahui bahwa capaian BPBL Ambon baik secara volume maupun prosentase belum dapat dibandingkan disebabkan Capaian IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan zona integritas dimana pemenuhan dokumen di 6 unsur penguatan serta persepsi anti korupsi dapat diperoleh dengan baik.

IKU 14 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.830.270.000.

Capaian Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 18. Capaian IKU “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
85	94,23	110,86	116,4	95,24	92	102,42

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (*pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM*); (ii) Mendukung manajemen kas (*pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D*); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (*penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja*).

Hasil capaian IKU ini di triwulan kedua adalah 94,23 dimana telah melebihi target yaitu 85. Capaian dapat dilihat pada data aplikasi OMSPAN

NO	KODE BAHAS	KODE OK	KODE BAKOS	URAIAN DATA	KETERANGAN	BEBAN PERNYAAN ANGGARAN			KULIAH PEKERJAAN ANGGARAN			REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TETAP	HANYA SUDUT	DEKORASI 3PM (REKORDEK)	WISDA PERFORMA TOTAL/KEBERHASILAN SUDUT	
						WISDA SPA	DOKUMEN HALAMAN 3 3PN	PERMISYAN ANGGARAN	WELANGA BUKTI/ACTUAL	PENGESAHAN TUGAS	PENGESAHAN LP DAN TAP	Jumlah Output					
1	001	001	007720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Baru	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	94,23	34,23	100%	0,00	94,23	
					Buku	10	10	20	30	30	30	10	20				
					Halv ARA	10,00	1,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	21,23				
					Halv Apak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Gambar 8. Tangkapan layar capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon TW II di aplikasi MonevPA kemenkeu

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian IKU ini yang dinilai 94,23 telah melebihi target triwulan ini. Namun nilai tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKP DJPB hal ini dikarenakan realisasi anggaran selaras dengan rencana penarikan dana pada Hal III DIPA karena pada sebagian kegiatan terutama pada kegiatan bantuan pemerintah tidak berjalan sesuai jadwal. Hal ini terjadi pada kegiatan proses CPCL dan /atau menunggu rekomendasi usulan penerima bantuan dari mitra komisi IV DPR RI.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 17 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai

dengan Triwulan kedua Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama namun nilai capaian BPBL Ambon begitu juga bila dibandingkan nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya Semester I sebesar 97,11.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU 15 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi

- a. Capaian Keluaran. Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 19. Capaian IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	71,5	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon meliputi: pengelolaan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku terus dilakukan secara periodik bulanan untuk mendukung indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon berupa pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU 16 : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon Pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun 2025. Untuk capaian di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian IKU “Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)			Target (indeks)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	3	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

IKU 17 : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam

Yosal (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 21. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.

4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.
----	-------------------------	--

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian IKU “Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
86	100	116,28	116,28	100	86	116,28

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana mencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 relatif sama bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif telah diperoleh capaian maksimal

Rencana Tindak lanjut

Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

IKU 18 : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah dan badan publik. Menurut para pakar, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, informasi publik adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan negara, termasuk pemerintahan, lembaga publik, dan badan publik lainnya. Informasi publik mencakup berbagai jenis informasi yang wajib diungkapkan, seperti informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan, kinerja, keuangan, dan kegiatan badan publik.

Tabel 23. Deskripsi Jenis Informasi Publik

No.	Jenis Informasi	Deskripsi
1.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Informasi ini meliputi informasi tentang profil badan publik, program dan kegiatan, peraturan, keputusan, kebijakan, laporan kinerja, dan laporan keuangan
2.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	Informasi ini adalah informasi yang apabila tidak segera disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya informasi tentang bencana, keadaan darurat, atau situasi yang bersifat urgensi.
3.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	Informasi ini adalah informasi yang sudah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat atas permintaan.
4.	Informasi Yang Dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rahasia Negara, Informasi yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi. • Rahasia Pribadi: Informasi tentang data pribadi seseorang yang tidak dapat diakses tanpa izin. • Rahasia Bisnis: Informasi yang bersifat rahasia dan dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. • Informasi yang Belum Dipastikan Kebenarannya: Informasi yang masih dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan.

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi public lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Indikator ini merupakan salah satu indicator baru dalam perjanjian kinerja 2025, memiliki target sebesar 80 dan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Beberapa tantangan dalam proses implementasi keterbukaan informasi publik adalah :

- Masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai UU KIP.

- Beberapa badan publik mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara efektif.
- Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas PPID mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi. - Keterbukaan informasi publik juga berperan dalam mendorong inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah sosial.
- Selain itu, keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi KKN dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan sumber daya publik.
- Dalam konteks global, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks demokrasi suatu negara, di mana negara yang lebih terbuka cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi.
- Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan transparan. - Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung aksesibilitas informasi, seperti portal informasi publik yang user-friendly.
- Penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi publik secara lebih luas dan cepat.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah.
- Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan.
- Keterbukaan informasi juga dapat mendorong inovasi dalam pelayanan publik, di mana masyarakat dapat memberikan ide-ide baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah.
- Dalam jangka panjang, keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan dalam pemerintahan dan

masyarakat. - Hal ini akan memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

- Keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan daya saing suatu negara di kancah internasional, karena negara yang transparan cenderung lebih menarik bagi investor.
- Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat membantu dalam penanganan isu-isu krusial seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, di mana partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
- Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.
- Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi harus melibatkan pelatihan bagi petugas publik agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan informatif. Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait informasi yang disediakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan partisipasi aktif masyarakat.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon dengan capain diukur di akhir tahun. Capaian di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24. Capaian IKU “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	80	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

BPBL Ambon telah menerima penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. Peningkatan capaian pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBL Ambon Tahun 2025 meliputi pengelolaan dokumen dan website PPID BPBL Ambon.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah Peningkatan capaian pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBL Ambon Tahun 2025 meliputi pengelolaan dokumen dan website PPID BPBL Ambon.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure*.

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip daalm tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon di triwulan kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	70	0

Capaian IKU ini belum dapat dinilai karena perhitungannya akan dihitung di akhir tahun 2025.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Terkait IKU ini, petugas kearsipan BPBL Ambon telah mulai menginventaris dokumen-dokumen kearsipan dan menginput pada Lembar Kerja Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga (Formulir ASKI KL). Formulir ini berguna untuk mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan arsip, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kearsipan yang telah dilakukan di BPBL Ambon.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 25 dapat diketahui bahwa capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama namun nilai capaian BPBL Ambon relatif sama dengan capaian satker lain, hal ini dikarenakan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan dimana perhitungannya dilakukan pada akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip.

IKU 20 : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersediaan benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.

- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon, pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon di triwulan kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	80	0

Capaian dan perhitungan IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana mencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon pada triwulan ini meliputi inventaris data calon penerima bantuan yang disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2025 yang memiliki kartu KUSUKA.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 26 dapat diketahui bahwa Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP.

IKU 21 : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses tertentu. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas.

Definisi SOP adalah dokumen yang menjelaskan cara melakukan suatu aktivitas atau proses dengan cara yang terstandarisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan atau panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas tertentu, yang bertujuan untuk mengurangi variasi dalam pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi.

Tujuan SOP adalah SOP membantu memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tugas yang sama mengikuti langkah-langkah yang sama, sehingga

hasilnya konsisten, Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kualitas produk atau layanan dapat terjaga, SOP berfungsi sebagai alat pelatihan bagi karyawan baru, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan tugas mereka. SOP menetapkan tanggung jawab dan peran setiap individu dalam proses, sehingga memudahkan dalam penilaian kinerja, dan Dalam banyak industri, SOP diperlukan untuk memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh badan pengawas.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Capaian IKU “Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan II Tahun 2025			Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	65	0

Capaian persentase penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025 belum ada karena pengukuran IKU ini dilakukan di akhir tahun.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 6.927.903.524 atau 48,00 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Kegiatan inventarisasi, review dan revisi terhadap semua SOP kegiatan di BPBL Ambon telah dilaksanakan untuk memastikan SOP kegiatan tersebut masih relevan dan untuk menjaga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa SOP yang direvisi berdasarkan hasil audit dari itjen seperti SOP pelayanan dan SOP Penggunaan Sarana Prasarana

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah melakukan telaah pada semua SOP dan revisi / perbaikan terhadap SOP yang tidak sesuai lagi.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2025 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 24.830.270.000 Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2025, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan Juni 2025 telah tercapai sebesar Rp. 8,095,793,828 atau 32,60% dari total pagu anggaran. Pembagian realisasi alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.798.479.947 (ii) Belanja Barang sebesar Rp 3.297.213.881; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 0.

Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Triwulan II pada Tahun 2025 dan 2024

JENIS BELANJA	TRIWULAN II TAHUN 2025			TRIWULAN II TAHUN 2024		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	9.385.610.000	4.798.479.947	51,13	9.253.840.000	4.981.230.676	53,83
Barang	15.179.660.000	3.297.213.881	21,72	22.781.151.000	11.838.295.665	51,76
Modal	265.000.000	0	0	1.600.000.000	507.517.393	31,72
Total	24.830.270.000	8.095.793.828	32,60	33.724.991.000	17.327.043.734	51,38

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 29. Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan II tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	958.000.000	6.870.000	Capaian 0,72%
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	305.968.000	305.968.000	Capaian 100%
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	1.329.391.000	924.686.704	Capaian 69,56%
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	69.414.000	49.153.000	Capaian 70,81%
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	15.538.000	0	
		Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	160.000.000	0	
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	1.081.300.000	3.207.600	Capaian 0,30%
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	222.520.000	141.931.000	Capaian 63,78 %
4.	Terwujudnya Layanan	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	14.432.846.000	6.927.903.524	Capaian 48,00%

Dukungan Manajemen yang baik	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81			
	Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%			
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%			
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76			
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92			
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5			
	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3			
	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%			
	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%			
	Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%			
	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%			

Apabila dilihat berdasarkan jenis kegiatan, maka realisasi belanja terbesar yaitu Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik dengan realisasi sebesar 48,00% %. Adapun realisasi belanja terendah berada pada kegiatan Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar dengan realisasi sebesar 0,72%. Rendahnya serapan untuk kegiatan sistem perikanan budi daya air

tawar terkait dengan belum adanya rekomendasi dari anggota DPR RI untuk usulan calon penerima bantuan sarana bioflok.

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran di triwulan kedua tahun 2025 menunjukkan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, Google Meet merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas,

maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.

- Kegiatan koordinasi dengan stakeholder sering digunakan sarana elektronik/online untuk mengefisiensi penggunaan anggaran.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan II Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, terdapat upaya-upaya untuk mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja triwulan kedua pada tahun 2025 telah mencapai target.

4.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada triwulan kedua tahun 2025, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di awal tahun, disiasati dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan dan pengaturan sumber daya manusia yang fleksibel dan dengan memperhatikan beban pekerjaan sehingga tidak mempengaruhi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Memasuki triwulan ketiga diperkirakan masih terjadi kondisi cuaca yang kurang baik yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya terutama di kegiatan budidaya ikan di keramba jaring apung yang sangat dipengaruhi perubahan parameter lingkungan sekitar. masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya sarana filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya serangan ektoparasit dan bakteri, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target.

4.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan mengurangi sarana perbenihan ikan laut sebagai langkah efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memproduksi benih ikan laut.
- Melakukan penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban pekerjaan.
- Telah dilakukan perawatan sand filter dan pembersihan sarana filter guna meningkatkan sistem filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah menginstruksikan kepada pegawai untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar.
- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Melakukan perbaikan sarana dan teknik kultur pakan alami skala massal untuk meminimalisir kegagalan dalam kegiatan produksi pakan alami untuk menunjang kegiatan pemeliharaan larva ikan.
- Meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stakeholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBP balai di waktu kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan kedua ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 2. DATA DUKUNG PRODUKSI CALON INDUK IKAN AIR LAUT UNTUK
BANTUAN DAN OPERASIONAL UPT BPBL AMBON (EKOR)
S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS IKAN	TARGET	CAPAIAN PRODUKSI CALON INDUK (EKOR)			%
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL CAPAIAN (Ekor)	
1.	Kakap Putih	1142	-	308	308	33,09
2.	Bubara		-	-	-	
3.	Clownfish		70	-	308	
	TOTAL		70	308	378	33,09

Ambon, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 3. DATA DUKUNG BENIH IKAN AIR LAUT YANG DISALURKAN KE
MASYARAKAT SATKER BPBL AMBON (EKOR)
S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BENIH IKAN LAUT (EKOR)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL CAPAIAN	%
1.	Ikan Konsumsi Laut	423.586	93500	54000	147.500	35,53
2.	Ikan Hias Laut		2500	500	3000	
	TOTAL		96.000	54500	150.500	35,53



Ambon, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono

**DATA DUKUNG BENIH IKAN AIR LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT SATKER BPBL AMBON (EKOR) S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

No	Nama Penerima	Nama Kelompok	NIK	HP	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Titik Koordinat	Tanggal Distribusi	Komoditas	Ukuran	Jumlah	Nilai Bantuan (Rp)	Nomor BAST	Nomor SK
1	Wagito	Kepiting Jaya	8101060708760000	82290564566	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara Timur Seti	Kobisonto	-2°9'6"22" S 129°9'2'43" E	24 Januari 2025	Kakap Putih	Benih	80,000	8,000,000	B.250/BPBLA/PB.140/II/2025	B.216/BPBLA/PB.150/II/2025
2	Syarif Tuasikal	Kasinyapu	8101062004800005		Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	-2°9'57"9" S 129°18'27"7" E	28 Januari 2025	Kakap Putih	Glondongan	2,000	5,000,000	B.264/BPBLA/PB.140/II/2024	
3	Umar Lethit	Tolon Ain	8101062104730002		Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	-2°9'57"9" S 129°18'27"7" E	28 Januari 2025	Kakap Putih	Glondongan	2,000	5,000,000	B.265/BPBLA/PB.140/II/2024	
4	Hambali Ipaen	Nusa Manu			Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	-2°9'57"9" S 129°18'27"7" E	28 Januari 2025	Kakap Putih	Glondongan	2,000	5,000,000	B.266/BPBLA/PB.140/II/2024	
5	Said M Al Idrus	Lehoti	8101060705690004		Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	-2°9'57"9" S 129°18'27"7" E	28 Januari 2025	Kakap Putih	Glondongan	2,000	5,000,000	B.263/BPBLA/PB.140/II/2024	
6	Tjoa T Pinontoan	PERMABUDHI		81343111606	Maluku	Ambon	Sirimau	Mardika	-3631406 ° S 128.21485 ° E	10 Februari 2025	Kakap Putih Ikan Hias	Glondong Benih	500 500	1,250,000 15,625,000	B.355/BPBLA/PB.150/II/2025	
7	Yusuf Tanamal	Lalosi	8171041803820004	85110441016	Maluku	Ambon	Teluk Baguala	Poka	-3°68'83,69" S 128°19'85,57" E	08 Maret 2025	Kakap Putih Ikan Hias	Glondongan Benih	2,500 1,000	6,250,000 14,750,000	B.561/BPBLA/PB.140/III/2025	B.547/BPBLA/PB.150/III/2025
8	La Musu	Teri	8171030104740005	85255997094	Maluku	Ambon	Baguala	Waiheru	-3°68'83,69" S 128°19'85,57" E	08 Maret 2025	Kakap Putih Ikan Hias	Glondongan Benih	2,500 1,000	6,250,000 14,750,000	B.559/BPBLA/PB.140/III/2025	
9	Latande	Nelayan 7 Putra	8104011101950007	81247298144	Maluku	Buru	Namlea	Jamilu	3°16'17" S 127°2'16" E	09 Juni 2025	Kakap Putih	Glondongan	4,000	10,000,000	B.1117/BPBLA/PB.140/VI/2025	B.1088/BPBLA/PB.150/VI/2025
10	Hadi Setio	Indah Jaya	8106012907750001	82238186789	Maluku	Seram Bagian Barat	Kairatu	Kairatu	3°21'15,24" S 128°21'24,94" E	20 Juni 2025	Kakap Putih	Benih	50,000	55,000,000	B.1201/BPBLA/PB.140/VI/2025	B.1168/BPBLA/PB.150/VI/2025
11	Suci M Eddy	Penjaga Laut Indonesia		81310370216	Maluku	Ambon	Sirimau	Waihaong		28 Juni 2025	Ikan Hias	Benih	500	15,625,000	B.1252/BPBLA/PB.140/II/2025	





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 4. DATA DUKUNG SAMPEL PENYAKIT IKAN AIR LAUT YANG DIUJI
DALAM RANGKA PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN SATKER BPBL AMBON (SAMPEL)
S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL LABORATORIUM (SAMPEL)			%
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL CAPAIAN	
1.	Kualitas Air	238	115	21	136	140,78
2.	Mikrobiologi	49	220	67	287	
3.	Biologi Molekuler	22	11	1	12	
	TOTAL	309	346	89	435	140,78

Ambon, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 5. DATA DUKUNG SAMPEL MONITORING PENYAKIT IKAN DAN AMR
YANG DIUJI SATKER BPBL AMBON (SAMPEL)
S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL AMR (SAMPEL)			%
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL CAPAIAN	
1.	AMR	17	13	0	13	76,47
	TOTAL		13	0	13	76,47



Ambon, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 8. DATA DUKUNG BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN YANG
DISALURKAN KE MASYARAKAT SATKER BPBL AMBON (Kg)
s.d TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT (Kg)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL CAPAIAN (Kg)	(%)
1.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	10124 Kg	500	1000	1500	14,79
	TOTAL		500	1000	1500	14,79

Ambon, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4204/DJPB.1/TU.140/VII/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Capaian IKU IP-ASN Semester I Tahun 2025
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

9 Juli 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 1105/SJ.3/TU.140/VII/2025, tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 7 Juli 2025 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *dashboard* IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu **82,02 (kategori tinggi)**, yang terdiri dari **Kualifikasi 22,08; Kompetensi 29,29; Kinerja 25,64; dan Disiplin 5,00**. Adapun data capaian dapat dilihat pada tautan <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn>, atau telah kami rangkum sebagaimana pada lampiran 2.
2. Target Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada semester 1 Tahun 2025 adalah 74. Capaian Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Semester I Tahun 2025 adalah **82,02**. Dengan Demikian Capaian IP ASN pada Semester I tahun 2025 adalah **110,84%** dari target yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Lampiran

Nomor : B.4204/DJPB.1/TU.140/VII/2025

Tanggal : 9 Juli 2025

Daftar Penerima Surat

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Plh. Direktur Rumput Laut
5. Direktur Prasarana dan Sarana
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
13. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
17. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
18. Kepala Balai Layanan Produksi dan Usaha Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
21. Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

Lampiran

Nomor : B.4204/DJPB.1/TU.140/VII/2025

Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
PER TANGGAL 7 JULI 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	22,02	24,30	25,25	5,00	76,57	Sedang
2.	Dit Ikan Air Tawar	24,03	23,45	25,83	5,00	78,31	Sedang
3.	Dit Ikan Air Payau	22,63	24,93	25,66	5,00	78,22	Sedang
4.	Dit Ikan Air Laut	23,33	23,87	25,69	5,00	77,90	Sedang
5.	Dit Rumput Laut	23,44	26,69	25,78	5,00	80,91	Sedang
6.	Dit Prasarana dan Sarana	22,88	24,61	25,30	5,00	77,80	Sedang
7.	BBPBAP Jepara	22,71	29,36	25,30	5,00	82,37	Tinggi
8.	BBPBAT Sukabumi	21,84	32,27	25,52	5,00	84,62	Tinggi
9.	BBPBL Lampung	21,86	33,87	27,82	5,00	88,55	Tinggi
10.	BPBAP Situbondo	22,12	28,47	25,47	5,00	81,06	Tinggi
11.	BPBAP Takalar	21,47	30,77	26,14	5,00	83,38	Tinggi
12.	BPBAP Ujung Batee	22,17	27,41	25,00	5,00	79,59	Sedang
13.	BPBAT Mandiangin	21,33	27,92	24,58	5,00	78,84	Sedang
14.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	21,13	26,54	25,15	5,00	78,82	Sedang
15.	BPBAT Tatelu	21,79	32,93	25,54	5,00	85,25	Tinggi
16.	BPBL Ambon	22,09	32,11	25,82	5,00	85,02	Tinggi
17.	BPBL Batam	21,64	33,73	26,55	5,00	86,91	Tinggi
18.	BPBL Lombok	21,84	29,47	25,00	5,00	81,31	Tinggi
19.	BLUPPB Karawang	20,53	35,61	26,14	5,00	87,27	Tinggi
20.	BPIUUK Karangasem	22,34	29,27	25,00	5,00	81,61	Tinggi
21.	BPKIL Serang	22,37	29,59	25,00	5,00	81,95	Tinggi
Rata-Rata		22,08	29,29	25,64	5,00	82,02	Tinggi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

Silakan ketik Nama Unit Kerj

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	55	22.09	88.36 %	32.11	80.27 %	25.82	86.07 %	5	100 %	85.02	TINGGI
17	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	46	22.17	88.68 %	27.41	68.53 %	25	83.33 %	5	100 %	79.59	SEDANG
18	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	55	21.73	86.92 %	32.98	82.45 %	25.55	85.17 %	5	100 %	85.25	TINGGI
19	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG	56	20.54	82.16 %	35.63	89.08 %	26.16	87.2 %	5	100 %	87.33	TINGGI
20	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI	32	22.34	89.36 %	29.27	73.17 %	25	83.33 %	5	100 %	81.61	TINGGI
21	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG	38	22.37	89.48 %	29.59	73.98 %	25	83.33 %	5	100 %	81.95	TINGGI

< 1 >



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4132/DJPB.1/TU.140/VII/2025 7 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan II Tahun 2025

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2025 lingkup DJPB sebesar 94,12% (tuntas 240 dari 255 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran II.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : B.4132/DJPB.1/TU.140/VII/2025
Tanggal : 7 Juli 2025

Daftar Penerima Surat

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
2. Direktur Ikan Air Tawar
3. Direktur Ikan Air Payau
4. Direktur Ikan Air Laut
5. Plh. Direktur Rumput Laut
6. Direktur Prasarana dan Sarana
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
9. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi
13. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
14. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
15. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
18. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
19. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
20. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem
21. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B.4132/DJPB.1/TU.140/VII/2025
Tanggal : 7 Juli 2025

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,44%
2	Direktorat Ikan Air Laut	87,50%
3	Direktorat Rumput Laut	89,19%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	94,12%
5	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
6	Direktorat Prasarana dan Sarana	94,12%
7	BBPBAP Jepara	100,00%
8	BBPBL Lampung	94,12%
9	BBPBAT Sukabumi	94,12%
10	BPBAP Situbondo	100,00%
11	BPBAP Takalar	94,12%
12	BPBAT Sungai Gelam	94,12%
13	BPBAT Mandiangin	94,12%
14	BPBL Batam	100,00%
15	BPBL Lombok	94,12%
16	BPBL Ambon	94,12%
17	BPBAP Ujung Batee	94,12%
18	BPBAT Tatelu	96,00%
19	BLUPPB Karawang	86,67%
20	BPIUUK Karangasem	100,00%
21	BPKIL Serang	94,12%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4232/DJPB.1/KU.510/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan ditetapkannya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target nilai IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I ditetapkan sebesar 85,00 dan Semester II Tahun 2025 sebesar 92,00 (nilai akhir).
2. Berdasarkan data aplikasi *OMSPAN* per tanggal 10 Juli 2025 bahwa nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya Semester I sebesar 97,11 dari target sebesar 85,00.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan capaian IKPA Satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada masing-masing Satker.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

An.Dirjen Perikanan Budi Daya,
Seditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
2. Inspektur III, Itjen KKP

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.4232/DJPB.1/KU.510/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Direktur Prasarana dan Sarana
2. Direktur Ikan Air Tawar
3. Direktur Ikan Air Payau
4. Direktur Ikan Air Laut
5. Direktur Rumput Laut
6. Kepala BBPBAP Jepara
7. Kepala BBPBL Lampung
8. Plt. Kepala BBPBAT Sukabumi
9. Kepala BPBAP Ujung Batee
10. Kepala BBPBAP Takalar
11. Kepala BLU BPBAP Situbondo
12. Kepala BPBAT Tatelu
13. Plt. Kepala BPBAT Sungai Gelam
14. Plt. Kepala BPBAT Mandiangin
15. Kepala BPBL Ambon
16. Plt. Kepala BPBL Batam
17. Plt. Kepala BPBL Lombok
18. Kepala BLUPPB Karawang
19. Kepala BPIU2K Karangasem
20. Kepala BPKIL Serang

An.Dirjen Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran surat Dinas

Nomor : B.4232/DJPB.1/KU.510/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

No	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100	85.06	91.74	100	100	89.75	100	95.08
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Akhir	10	12.76	18.35	10	10	8.98	25	
		Nilai Aspek	92.53		95.37				100	
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100	100	100	0	0	100	100	100
		Bobot	10	15	0	0	0	0	25	
		Nilai Akhir	10	15	0	0	0	0	25	
		Nilai Aspek	100		100				100	
3	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Aspek	100		100				100	
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100	100	100	0	0	98.29	100	100
		Bobot	10	15	0	0	0	0	25	
		Nilai Akhir	10	15	0	0	0	0	25	
		Nilai Aspek	100		100				100	
5	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Aspek	100		100				100	
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100	93.23	100	100	100	100	100	98.98
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
		Nilai Akhir	10	13.98	20	10	10	10	25	
		Nilai Aspek	96.62		100				100	
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100	94.8	100	0	0	99.48	100	98.96
		Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
		Nilai Akhir	10	14.22	20	0	0	9.95	25	
		Nilai Aspek	97.4		99.74				100	

8	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100	92.85	100	100	100	100	98.47	
		Bobot	10	15	0	10	10	0		25
		Nilai Akhir	10	13.93	0	10	10	0		25
		Nilai Aspek	96.43			100				100
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100	88.71	100	0	0	100	97.88	
		Bobot	10	15	20	0	0	10		25
		Nilai Akhir	10	13.31	20	0	0	10		25
		Nilai Aspek	94.36			100				100
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100	89.56	98.85	100	100	95.88	97.79	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	13.43	19.77	10	10	9.59		25
		Nilai Aspek	94.78			98.68				100
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100	100	99.85	100	100	100	96.47	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	15	19.97	10	10	10		21.5
		Nilai Aspek	100			99.96				86.01
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100	81.43	100	100	100	91.47	95.38	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	12.21	20	10	10	9.15		24.02
		Nilai Aspek	90.72			97.87				96.07
13	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100	68.31	100	100	100	99.06	95.15	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	10.25	20	10	10	9.91		25
		Nilai Aspek	84.16			99.76				100
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100	90.98	100	100	100	93.54	94.23	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	13.65	20	10	10	9.35		21.23
		Nilai Aspek	95.49			98.39				84.93
15	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100	85.46	97.56	100	100	100	91.06	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	12.82	19.51	10	10	10		18.73
		Nilai Aspek	92.73			99.39				74.91
16	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100	83.39	100	100	100	100	88.31	
		Bobot	10	15	20	10	10	10		25
		Nilai Akhir	10	12.51	20	10	10	10		15.8
		Nilai Aspek	91.7			100				63.21

WhatsApp Kinerjaku - Ropeg Warehouse Indikator Pelaksanaan Anggaran

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPSatker/IndikatorKinerja

SMART | KEMENKEU e-ZI e-SAKIP REVUI 2023 - Aplikasi Pela... Home E-Pegawai Perikanan - Pencaria... eKinerja 2022 Search - Medcom.id Direktorat Jenderal... detiksearch All Bookmarks

MONEVPA BALAI BUDIDAYA ... T.A. 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | JUNI** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	90.98	100.00	100.00	100.00	93.54	84.93	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	20.00	10.00	10.00	9.35	21.23				
					Nilai Aspek	95.49		98.39				84.93				

News for you Box Office: Jura5... Search ENG US 5:36 PM 7/8/2025



DATA DUKUNG

Triwulan II_2025

**RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL
DAN POSITIF TERHADAP TOTAL
PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR
PERIKANAN BUDIDAYA**

Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

LAPORAN CAPAIAN RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL DAN POSITIF TERHADAP TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN II TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Secara umum komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai media untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pemberitaan program – program kebijakan perikanan budidaya telah menyusun publikasi dalam bentuk rilis media dan konten infografis dengan mengangkat pemberitaan keberhasilan program perikanan budidaya di masyarakat.

Penyebaran informasi sector perikanan budidaya yang selama ini dilaksanakan adalah bentuk dokumentasi dan peliputan kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB dalam rangka mensosialisasikan program prioritas perikanan budidaya.

Selain pemberitaan yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pengumpulan pemberitaan sub sector perikanan budidaya juga diperoleh dari informasi atau berita media online yang memuat berita sub sector perikanan budidaya secara umum sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan inputan bagi peningkatan kualitas pemberitaan perikanan budidaya dalam mendukung kemajuan program kebijakan sector perikanan dan kelautan.

II. DESKRIPSI TONE BERITA

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 1. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

III. RASIO JUMLAH PEMBERITAAN YANG NETRAL DAN POSITIF DIBANDING TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN II 2025

1. Publikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh Bagian Program, Data dan Informasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon agar mampu berperan sebagai media pemberi informasi terhadap kebijakan maupun keberhasilan BPBL Ambon kepada masyarakat pembudidaya;
2. Capaian keberhasilan pencapaian ini didorong oleh gencarnya publikasi kegiatan BPBL Ambon yang bernilai positif dengan dilakukan penyebaran konten informasi teknis maupun kegiatan prioritas yang di upload pada kanal media BPBL

Ambon sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya pemberitaan positif sub sector perikanan budidaya di masyarakat;

3. Pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan tentang perikanan budidaya yang dimuat di media massa baik lokal maupun nasional;
4. Realisasi rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor Perikanan Budidaya Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100 % dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan memiliki tendensi isu positif.
5. Keberhasilan capaian ini menunjukkan semakin membaiknya pemberitaan perikanan budidaya di berbagai media baik cetak maupun online.

IV. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN APRIL 2025

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antarane.ws.com/berita/4802061/ptba-tebar-30-ribu-bibit-ikan-berdayakan-ekonomi-warga-sawahlunto	29 April 2025	PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pertambangan Ombilin menyerahkan bantuan 30.000 ekor bibit ikan kepada kelompok masyarakat pengelola sungai di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. General Manager PTBA Unit Pertambangan Ombilin Yulfaizon dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan, bantuan bibit ikan ini diharapkan dapat dikembangbiakkan dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat setempat. Bantuan yang diserahkan meliputi 12.000 ekor bibit ikan gariang dan 18.000 ekor bibit ikan patin.	Positif	Pewart a: Indra Arief Pribadi Editor: Ahmad Buchori
2	https://www.antarane.ws.com/berita/4800601/indonesia-korsel-kolaborasi-membudidayakan-napoleon-berkelanjutan	28 April 2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama National Institute of Fisheries Science (NIFS) Korea Selatan (Korsel) berkolaborasi menjaga populasi ikan napoleon melalui skema pengembangan budi daya berkelanjutan di Indonesia.	Positif	Pewart a: Muhammad Harianto Editor: Budisantoso Budiman

			<p>Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan kolaborasi itu tertuang dalam Project for Smart Technological Support to Improve Aquaculture Productivity in Indonesia.</p> <p>"Ikan napoleon termasuk jenis ikan yang tercantum dalam Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. KKP akan terus perkuat salah satunya dari aspek budi daya ikan napoleon,"</p>		
3	https://www.antaranews.com/berita/4798185/kkp-ingatkan-pelaku-usaha-kantongi-kkp-rl-untuk-dukung-kek-morotai	27 April 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan setiap pelaku usaha untuk mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai syarat utama mendukung pemanfaatan ruang laut dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, Maluku Utara.</p> <p>"KKPRL sebagai persyaratan dasar pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana</p> <p>hal itu guna memastikan kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan</p>	Positif	<p>Pewartu: Muhammad Harianto Editor: Zaenal Abidin</p>

			<p>rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).</p> <p>kawasan Morotai masuk ke dalam Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) Laut Maluku sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.</p>		
4	https://www.antarane.ws.com/berita/4788901/komoditas-ikan-lele-cirebon-berhasil-tembus-pasar-ekspor	23 April 2025	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyebutkan komoditas ikan lele dari daerah itu berhasil menembus pasar ekspor ke sejumlah negara pada 2024, dengan total pengiriman sekitar 23 ton.</p> <p>“Ekspor ikan lele oleh Kelompok Kersa Mulya Bakti pada tahun tersebut mencapai 23 ton atau 23.048,3 kg ke beberapa negara tujuan,”</p> <p>keberhasilan ini menunjukkan potensi besar sektor budi daya perikanan di Kabupaten Cirebon dalam memenuhi standar mutu internasional serta mampu bersaing di pasar global.</p>	Positif	<p>Pewartu: Fathnur Rohman Editor: Zaenal Abidin</p>

5	https://www.antaraneews.com/berita/4775805/cirebon-optimalkan-85-ribu-benih-ikan-untuk-ketahanan-pangan	16 April 2025	<p>Kota Cirebon Jawa Barat mengoptimalkan bantuan 85 ribu ekor benih ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Jabar guna memulihkan ekosistem perairan umum sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat.</p> <p>“Bantuan tersebut disalurkan melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan ditebar di Sungai Kalijaga, tepatnya di wilayah Benda Kerep, Kelurahan Argasunya hari ini,”</p> <p>Bantuan tersebut dioptimalkan melalui pengembangan potensi perikanan di wilayah perkotaan, termasuk dengan menebar sebagian benih ikan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perairan di Cirebon.</p>	Positif	Pewartanya: Fathnur Rohman Editor: Iskandar Zulkarnaen
6	https://www.antaraneews.com/berita/4775021/kkp-soroti-pentingnya-petakan-potensi-pengembangan-kawasan-mangrove	16 April 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti pentingnya pemetaan target rehabilitasi mangrove serta potensi yang bisa dikembangkan di wilayah itu untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>Ketua Tim Kerja Restorasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Hery Gunawan Daulay mengatakan pihaknya mendukung</p>	Positif	Pewartanya: Prisca Triferia Violleta Editor: Risbiani Fardaniah

			<p>inisiatif internasional Mangrove Breakthrough untuk mendorong percepatan pengelolaan dan perlindungan mangrove di Tanah Air serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.</p> <p>"Saya pikir Mangrove Breakthrough bisa memformulasikan apa yang bisa disebut dengan pemetaan baik itu nanti perencanaan awal untuk mencapai target (rehabilitasi) 600 ribu hektare,"</p> <p>Indonesia sendiri sudah memiliki Peta Mangrove Nasional yang baru diperbaharui untuk tahun 2024, menetapkan luasan mangrove nasional saat ini adalah 3.440.464 hektare. Luasan itu termasuk yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.</p> <p>Selain pemetaan untuk melakukan rehabilitasi, dia menyebut pentingnya kolaborasi dalam pendanaan, tidak hanya untuk upaya penanaman dan pemeliharaan ekosistem mangrove, tapi juga pemberdayaan kawasan dan masyarakat sekitar lokasi.</p>		
--	--	--	--	--	--

7	https://www.antaraneews.com/berita/4774017/pemkab-kepulauan-seribu-siapkan-lahan-penanaman-mangrove	16 April 2025	<p>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan lahan penanaman 10 ribu bibit mangrove dan penebaran bibit ikan kerapu di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa.</p> <p>"Penanaman pohon mangrove (bakau) dan penebaran bibit ikan kerapu ini dipusatkan di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa,"</p> <p>Program TJSJ ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sektor perikanan dan kehutanan pesisir.</p>	Positif	Pewarta: Mario Sofia Nasution Editor: Ganet Dirgantara
8	https://www.antaraneews.com/berita/4771421/kkp-kembangkan-potensi-perairan-darat-sumsel-untuk-ketahanan-pangan	15 April 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan potensi perairan darat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah tersebut.</p> <p>"Berdasarkan data provinsi itu memiliki luas perairan darat mencapai 2,5 juta hektare yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan pangan dan membuka lapangan kerja," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta</p>	Positif	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Evi Ratnawati

			<p>potensi perairan darat di Sumsel tidak hanya besar secara luasan, tapi juga produktif. Produksi perikanan darat mencapai 70 ribu ton per tahun senilai Rp3,7 triliun dengan jumlah nelayan lebih dari 80 ribu orang yang menggantungkan hidup dari sektor ini.</p> <p>Selain fungsi ekonomi, perairan darat juga menawarkan jasa ekosistem dari konservasi keanekaragaman hayati hingga mitigasi risiko kebakaran lahan.</p>		
--	--	--	---	--	--

V. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN MEI 2025

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4862901/kkp-libatkan-pemda-implementasikan-ekonomi-biru-untuk-ketahanan-pangan	27 Mei 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan ekonomi biru untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan berkelanjutan.</p> <p>"Kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono</p> <p>Pelatihan bertajuk "Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan," tersebut menyasar 552 Kepala Dinas</p>	Positif	Pewartu: Muhammad Harianto Editor: Zaenal Abidin

			Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.		
2	https://www.antaraneews.com/berita/4862889/kkp-perpanjang-waktu-pengajuan-proposal-kampung-nelayan-merah-putih	27 Mei 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperpanjang batas waktu pengajuan proposal Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 3 Juni 2025.</p> <p>"Langkah ini diambil seiring meningkatnya antusiasme pemerintah daerah dan masyarakat kelautan perikanan dari berbagai wilayah di Indonesia," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Triana Yunanda. Dia menyebutkan, hingga Selasa (27/5) sore tercatat 214 proposal telah masuk pada Dashboard Penerimaan Proposal KNMP.</p> <p>"Program ini harus meninggalkan pola lama bahwa pemerintah datang memberi bantuan lalu pergi begitu saja. Kita ingin membangun ekosistem yang berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penerima manfaat,"</p> <p>Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan penguatan dan kelanjutan dari Program Kampung Nelayan Modern dan Kampung Perikanan Budidaya yang</p>	Positif	<p>Pewartanya: Muhammad Harianto Editor: Abdul Hakim Muhiddin</p>

			sebelumnya telah berhasil mengubah citra kawasan nelayan dan pembudidaya dari yang kumuh menjadi produktif dan berdaya saing.		
3	https://www.antaranews.com/berita/4861833/kkp-jamin-kualitas-layanan-kkpri-tidak-rumit	27 Mei 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kualitas layanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak rumit demi menjaga iklim usaha, serta melindungi ekosistem laut di Indonesia.</p> <p>“Silahkan dikomunikasikan jika ada kendala. Pintu komunikasi terbuka 24 jam plus, karena KKPRL ini krusial sekali untuk memastikan seluruh kegiatan di ruang laut berjalan sesuai koridornya,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana</p> <p>sejak tahun 2021 sampai 2024 KKP telah menerbitkan 2.370 dokumen KKPRL. Sedangkan awal tahun hingga pertengahan Mei 2025, sudah ada 241 dokumen KKPRL yang diterbitkan.</p> <p>"Tahun ini KKP menargetkan penerimaan negara bukan pajak PNBPN dari penerbitan perizinan KKPRL sebesar Rp500 miliar, dan</p>	Positif	<p>Pewartu: Muhammad Harianto</p> <p>Editor: Abdul Hakim Muhiddin</p>

			<p>saat ini telah tercapai Rp172 miliar, atau sekitar 34,43 persen dari target,"</p> <p>Kepatuhan para pemegang KKPRL menurutnya akan berdampak besar pada kelancaran ekosistem bisnis di ruang laut, maupun kelangsungan hidup biota di dalamnya.</p>		
4	https://www.antaraneews.com/berita/4858309/kkp-menargetkan-bangun-100-kampung-nelayan-merah-putih-di-2025#google_vignette	26 Mei 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi kelautan nasional.</p> <p>Dia menyampaikan pihaknya telah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.</p> <p>Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan <i>clear and clean</i> untuk</p>	Positif	<p>Pewartu: Muhammad Harianto Editor: Faisal Yuniarto</p>

			pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.		
5	https://www.antaraneews.com/berita/4841777/kkp-tingkatkan-serapan-udang-nasional-lewat-kampanye-gemarikan	18 Mei 2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan serapan udang nasional melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). udang tidak hanya sebagai komoditas ekspor unggulan, tetapi sumber protein berkualitas tinggi yang dapat dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. "Pada tahun 2023, serapan udang nasional dalam rumah tangga mencapai sekitar 242 ribu ton. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin komoditas udang dan produk olahannya dapat menjadi champion di menu sehari hari masyarakat Indonesia,"	Netral	Pewartanya: Muhammad Harianto Editor: Biqwanto Situmorang
6	https://www.antaraneews.com/berita/4839729/upaya-menyelamatkan-tempalak-mirah-pulau-bangka	17 Mei 2025	Di balik gemuruh aktivitas pertambangan bijih timah dan desakan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, tersembunyi ikan endemik bernama tempalak mirah (Betta burdigala) di selatan pulau penghasil bijih timah terbesar di Indonesia itu.	Positif	Editor: Sapto Heru Purnomojoyo

			<p>Meskipun berukuran mungil dan hidup di perairan tenang rawa-rawa gambut dan sungai kecil, tempalak mirah ini memiliki makna besar bagi identitas ekologis dan budaya masyarakat Bangka Selatan.</p> <p>Dalam laporan terbaru <i>International Union for Conservation of Nature</i> (IUCN), tempalak mirah masuk dalam kategori <i>Critically Endangered</i> (CR) alias berstatus sinyal merah yang menandakan bahwa spesies ini satu langkah lagi menuju kepunahan di alam liar.</p> <p>pelestarian tempalak mirah bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies ikan dari kepunahan. Ia adalah langkah awal untuk merajut kembali harmoni antara manusia dan alam.</p>		
--	--	--	---	--	--

VI. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN JUNI 2025

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4928133/kkp-terbitkan-regulasi-standar-bahan-baku-ikan-dongkrak-daya-saing	26 Juni 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan sebagai upaya meningkatkan daya saing dan jaminan mutu produk perikanan.</p> <p>Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS) KKP Tornanda Syaifullah mengatakan bahwa peraturan itu menjadi langkah strategis dalam mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung peningkatan akses pasar domestik maupun internasional.</p>	Positif	<p>Pewartanya: Muhammad Harianto Editor: D.Dj. Kliwantoro</p>
2	https://www.antaraneews.com/berita/4926773/kkp-pamerkan-potensi-udang-indonesia-di-shrimp-summit-2025-bali	26 Juni 2025	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memamerkan potensi pengembangan budidaya udang Indonesia pada acara Shrimp Summit 2025 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, guna menarik investasi dan</p>	Positif	<p>Pewartanya: Muhammad Harianto Editor: Biqwanto Situmorang</p>

			<p>memperluas pasar ekspor produk perikanan nasional.</p> <p>"Udang hasil produksi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, dan indukan udang Nusa Dewa mencuri perhatian pada acara itu," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah dalam keterangan di Jakarta, Kamis.</p> <p>dalam rangka memenuhi persyaratan pasar global yang semakin ketat, KKP telah membangun modeling BUBK di Kebumen, Jawa Tengah dengan menerapkan cara budidaya yang baik dan modern, serta mengedepankan keseimbangan ekologi dan rantai produksi yang tertelusur.</p>		
3	https://www.antaraneews.com/berita/4925801/pemkab-karawang-gandeng-kkp-untuk-revitalisasi-6979-hektare-tambak	26 Juni 2025	<p>Pemerintah Kabupaten Karawang menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Karawang, Jawa Barat, seluas 6.979,51 hektare.</p> <p>Disebutkannya, kerja sama KKP dengan Pemkab Karawang, Bekasi, Subang dan Indramayu itu merupakan bagian dari sinergi</p>	Positif	<p>Pewartu: M.Ali Khumaini</p> <p>Editor: Zaenal Abidin</p>

			dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan perikanan budidaya guna mendukung revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Barat.		
4	https://www.antaraneews.com/berita/4924677/kkp-akan-libatkan-agrinas-jaladri-di-revitalisasi-tambak-pantura-jawa	25 Juni 2025	<p>Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa.</p> <p>"Agrinas Jaladri diharapkan nanti sebagai operator di sini (program revitalisasi tambak) untuk kegiatan <i>on farm</i>," ujar Trenggono</p> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati kerjasama pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa sekitar 20.413,25 hektare dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Barat. Empat daerah sasaran program revitalisasi yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.</p> <p>Komoditas yang akan dikembangkan pada program revitalisasi tambak Pantura adalah nila salin. Menurut Trenggono, saat ini terdapat kurang lebih 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan ikan nila. Ikan ini</p>	Positif	Pewarta: Aji Cakti Editor: Adi Lazuardi

			lebih tahan akan penyakit dan pertumbuhannya cukup cepat. Selain itu, peluang pasar domestik dan ekspor ikan tilapia sangat besar.		
5	https://www.antaraneews.com/berita/4924569/jawa-tengah-dan-fujian-perkuat-kerja-sama-di-bidang-perikanan	25 Juni 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Provinsi Fujian, China, menyepakati kerja sama di bidang perikanan dan maritim dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (24/6). Kerja sama ini semakin memperkuat kemitraan provinsi kembar (sister-province) yang telah terjalin selama lebih dari dua dasawarsa. Kerja sama perikanan akan direalisasikan dalam bentuk transfer pengetahuan, program pelatihan, dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan di Jateng. Kedua pihak juga akan bekerja sama dalam mitigasi bencana terkait kemaritiman.	Positif	Pewarta: Xinhua Editor: Maria Rosari Dwi Putri
6	https://www.antaraneews.com/berita/4924449/gubernur-jabar-revitalisasi-tambak-membantu-kesejahteraan-masyarakat	25 Juni 2025	Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan program revitalisasi tambak di pantura Jawa Barat (Jabar) dapat membantu kesejahteraan masyarakat. "Hari ini kemakmuran rakyat Jabar terbantu dengan kebijakan Presiden Prabowo yang	Positif	Pewarta: Aji Cakti Editor: Faisal Yuniyanto

			dilaksanakan secara teknis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui program revitalisasi. Mudah-mudahan Nota Kesepakatan ini menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia semakin maju,”		
7	https://www.antaraneews.com/berita/4924053/menteri-kp-danantara-siap-dukung-revitalisasi-tambak-di-pantura-jawa	25 Juni 2025	<p>Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, Danantara siap mendukung program revitalisasi tambak di Pantura Jawa tahap I seluas 20 ribu hektare (Ha).</p> <p>"Investasi dari Danantara. Luasannya 20 ribu hektare, perkiraan investasi menurut kita sekitar Rp26 triliun,"</p> <p>Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu Ha tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.</p> <p>KKP menargetkan melalui revitalisasi tambak ini mampu meningkatkan produktivitas menjadi 144 ton/Ha/tahun dari sebelumnya 0,6 ton/Ha/tahun, volume produksi diperkirakan mencapai 1,18 juta ton dengan nilai produksi Rp30,65 triliun,</p>	Positif	Pewartanya: Aji Cakti Editor: Abdul Hakim Muhiddin

			<p>dan menciptakan peluang pekerjaan bagi 119.100 masyarakat hulu dan hilir.</p> <p>Komoditas yang akan dikembangkan adalah nila salin menimbang sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat. Selain itu, peluang pasar domestik dan ekspor ikan tilapia sangat besar.</p>		
--	--	--	--	--	--

VII. PENUTUP

A. Simpulan

1. Capaian adalah rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif total pemberitaan tentang perikanan budidaya;
2. Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya triwulan II, telah diperoleh capaian maksimal, Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

Ambon, 1 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono